

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses akuntansi atau tata kelola keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, (2006).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan

pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan nilai informasi laporan keuangan. Nilai informasi laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan sistem pengendalian yang ada. Tidak pula terlepas dari pengawasan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: a)

relevan; manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap, b) andal; dapat diverifikasi, penyajian jujur, dan netral, c) dapat dibandingkan, d) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem akan mampu dijalankan secara optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Selain sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberikan manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Hal lain yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Adanya kecurangan yang terjadi menunjukkan indikasi bahwa pengendalian internal belum berfungsi dengan baik.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan diperlukan media tertentu yang dianggap relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kawedar (2009) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kota Kupang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 Nomor 30.a./LHP/XIX.KUP/05/2017 yaitu: a) nilai investasi permanen pada PT Sasando belum didukung dengan Laporan Keuangan, investasi permanen pada KPN Maju belum didukung dengan laporan keuangan *audited* dan investasi permanen kepada PDAM Tirta Lontar belum didukung laporan keuangan *aaudited*; b) saldo aset tetap, pengelola sepenuhnya belum memadai di mana terdapat perbedaan pencatatan aset tetap antara Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan sebesar

Rp 22,9 Miliar, serta kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan jalan sebesar Rp 147,3 Miliar tidak dicatat sebagai penambah pada aset induk tetapi dicatat sebagai aset baru dengan umur ekonomis selama 10 tahun; c) beban barang dan jasa, belum termasuk beban yang berasal dari Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah penerima Dana BOS.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa nilai informasi merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang?
- b. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

- c. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah secara parsial terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Daerah

Sebagai evaluasi dan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini.